

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Bagi Negara Indonesia yang terdiri atas 33 provinsi dan 530 kota/kabupaten (Ditjen Otda Depdagri, 2012), pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk pemeratakan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Pembangunan di daerah perlu mendapat perhatian, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan. Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri /sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Adanya otonomi daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini agar dengan pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pembangunan daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan yang antara lain berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan

undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah.

Pajak hotel mempunyai kekuatan dan peluang sebagai sumber daya ekonomi, meskipun masih ada kelemahan dan ancamannya. Dalam tahap perkembangan faktor eksternal dan faktor internal sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Faktor internal tersebut antara lain, sistem dan prosedur, sumber daya manusia dan pengawasan. Sedangkan faktor eksternal antara lain kesanggupan dalam membayar pajak dan kesempatan dalam membayar pajak. Dengan semakin banyaknya obyek wajib pajak yang sanggup dan mau membayar pajaknya maka penerimaan pajak hotel akan semakin meningkat.

Jakarta merupakan wilayah metropolitan dimana Jakarta sebagai pusat bisnis, politik, kebudayaan, dan pariwisata. Sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor lainnya, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta baik dari nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya cenderung meningkat seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1.1**Jumlah Wisatawan Mancanegara di Wilayah DKI Jakarta**

Bulan	2012	2013	2014	Persentase
Januari	652.692	614.328	753.079	8,35%
Februari	592.502	678.415	702.666	9,04%
Maret	658.602	725.316	765.607	7,84%
April	626.100	646.117	726.332	7,81%
Mei	650.883	700.708	752.363	7,51%
Juni	695.531	789.594	851.475	10,68%
Juli	701.200	717.784	777.210	5,32%
Agustus	634.194	771.009	826.821	14,41%
September	683.584	770.878	791.296	7,71%
Oktober	688.341	719.903	808.767	8,46%
November	693.867	807.422	764.461	5,52%
Desember	766.966	860.655	915.334	9,28%
TOTAL	8.044.462	8.802.129	9.435.411	8,50%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2015

Berdasarkan data diatas, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut travel.detik.com perkembangan pariwisata di Indonesia bisa dibidang pesat. Namun, setidaknya ada 7 masalah yang masih menjadi hambatan bagi pariwisata di Indonesia. Hal itu dikemukakan Menparekraf Mari Elka Pangestu dalam seminar Gabungan Industri

Pariwisata Indonesia (GIPI). Hambatan tersebut diantaranya adalah sarana & prasarana, SDM, komunikasi & publisitas, kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi, kesiapan masyarakat dan yang terakhir yaitu investasi yang belum banyak berkembang di daerah.

Dengan adanya pertumbuhan jumlah wisatawan ini membuka peluang bagi pelaku bisnis dibidang perhotelan. Menurut berita yang dilansir oleh Kantor Berita RMOL Sumsel ada ketidak seimbangan antara data jumlah hotel yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang. Berdasarkan antara data yang dimiliki oleh BPS dan KPPT Kota Palembang, lebih dari 150 hotel, hampir sekitar 50 persennya tidak miliki izin operasional dari ke pariwisata.

Selain masalah pada jumlah wisatawan dan jumlah hotel, tingkat hunian hotel juga memiliki masalah tersendiri berdasarkan klikbekasi.co sebagai contoh salah satu hotel ternama yang terdapat di Bekasi dengan 40.774 kamar terpakai, ia hanya melaporkan omzet Rp 27,2 miliar kepada Dispenda. Setelah dihitung menggunakan tarif terendah, kurang omzet hotel bintang 4 itu ternyata mencapai Rp 1,1 miliar sehingga potensi pajak yang tidak tersetor Rp 114 juta. Dengan adanya kasus tersebut menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak hotel.

Dari kasus yang dipublikasi oleh Kontrasnew.com terjadi Penyelewengan pajak yang dilakukan oleh tiga pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dilakukan terhadap tiga jenis pajak, masing-masing pajak hotel, hiburan, dan restoran. Ketiga jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak yang mudah diselewengkan karena penentuan besarnya pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajaknya. Ini merupakan celah bagi oknum untuk menyelewengkan besaran pajaknya. Berbeda dengan jenis pajak lainnya yang besarnya sudah ditetapkan, sulit untuk diselewengkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tetapi, pada praktiknya masih banyak pemilik rumah kos yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Seperti berita yang dilansir dari beritajakarta.com menurut Kepala Seksi Pelayanan dan Pengolahan Informasi Data Pajak Daerah Suku Dinas Pajak Jakarta Barat menjelaskan bahwa dari ribuan usaha rumah kos di wilayah ini, ternyata baru 273 usaha kos yang terdaftar sebagai wajib pajak. Atas dasar fakta tersebut Suku Dinas Pajak Jakarta Barat menggelar razia rumah kos di Jalan Susilo RT 06/05, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan.

Berdasarkan hasil pendataan, diketahui dari 16 rumah kos yang ada, hanya tiga rumah kos yang tercatat menjadi wajib pajak.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu penulis memilih judul **“PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012-2014.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 7 hambatan bagi pariwisata di Indonesia, diantaranya adalah sarana & prasarana, SDM, komunikasi & publisitas, kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi, kesiapan masyarakat dan investasi yang belum banyak berkembang di daerah.

2. Terdapat ketidaksesuaian antara data BPS dan KPPT Kota Palembang. Dari 150 jumlah hotel hampir 50 persen yang tidak memiliki perizinan operasional dari kepariwisataan.
3. Tingkat hunian hotel memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, terbukti masih banyaknya hotel yang melakukan kegiatan ilegal dalam hal pelaporan pajak guna untuk meningkatkan pendapatannya.
4. Sistem dan prosedur, sumber daya manusia dan pengawasan menjadi kelemahan dalam pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta. Masih terdapat celah bagi oknum untuk melakukan penyelewengan pajak.
5. Di Jalan Susilo RT 06/05, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan. Diketahui bahwa dari 16 rumah kos yang ada, hanya tiga rumah kos yang tercatat menjadi wajib pajak.

C. Pembatasan Masalah

Penerimaan Pajak Hotel dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi pada beberapa aspek yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh Jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel.
2. Objek penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel Kota Jakarta periode 2012-2014?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta periode 2012-2014?
3. Bagaimana pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta periode 2012-2014?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan memberikan hasil jumlah hotel dan tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hal tersebut memperkuat teori keagenan yang menyatakan tentang *principal* melimpahkan wewenang atau kekuasaan kepada orang lain dalam hal ini agen untuk kepentingan masing-masing.

2. Kegunaan Praktik

- a) Dapat digunakan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kemajuan daerah.
- b) Sebagai evaluasi sektor pendapatan daerah yang kurang maksimal atau merugikan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Dasar

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Agency Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan *Agency Theory*, yang mana dinyatakan oleh Jansen dan Meckling (1976), bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Dalam teori keagenan Pemerintah Daerah memiliki 2 fungsional:

1. Pemerintah daerah sebagai agen dan Pemerintah pusat sebagai principal

Dalam kaitan *Agency Theory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Peran Pemerintah Pusat (*principal*) di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta

memberikan hak kepada Pemerintah Daerah (agen) untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, dalam hal ini Pemerintah menetapkan prinsip-prinsip uang berdasarkan fungsi. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang mana Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahannya di daerah, maka Pemerintah Pusat menurunkan Dana Perimbangan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya.

2. Pemerintah daerah sebagai *principal* dan Masyarakat sebagai agen
Selain itu, *Agency Theory* juga tersirat dalam hubungan antara masyarakat sebagai agen yang telah memberikan sumber penerimaan daerah lainnya berupa Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya kepada pemerintah daerah sebagai *principal*. Masyarakat memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Daerah berupa membayar pajak hotel atas pelayanan jasa hotel. Pihak hotel memungut pajak hotel dari masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut. Dari hasil pemungutan pajak hotel tersebut disetorkan ke kas daerah berupa penerimaan pajak hotel. Pemerintah Daerah sebagai *principal* menggunakan pajak hotel yang merupakan bagian dari Pendapatan

Asli Daerah tersebut untuk membantu mendanai aktivitas pemerintahan di daerah dan memberikan timbal balik kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang memadai.

2. Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005).

Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Mangkoesoebroto (1998), pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, fungsi pajak menurut Waluyo (2008) :

a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (dalam Waluyo, 2008), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah

sebagai berikut:

a) Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b) Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c) Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas yang berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Menurut Satria Adi Nugraha (2012), ada beberapa asas pajak yang dianut dari zaman ke zaman yaitu :

a) Asas Sumber Penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena asas ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

c) Teori Bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang,

jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Menurut Waluyo (2008), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1 Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2 Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3 Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi (yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota (yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu

faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah

dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

3. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut: “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut: “Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung tahun 2009-2013.

b. Sumber Penerimaan Pajak

1) Pajak penghasilan (pph)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4) Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta

kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

4. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Peraturan Daerah Kota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya tahun 2003, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang menginap/beristirahat, memperoleh bayaran,

dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah

fasilitas telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel).

Menurut Peraturan Daerah Kota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang “Pajak Hotel”, Subjek Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), dasar pengenaan Pajak Hotel adalah *jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel*. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi dan Herniwati Retno Handayani (2013), Satria Adi Nugraha dan Dul Muid (2012) penerimaan pajak hotel dihitung dalam satuan rupiah.

Secara umum perhitungan pajak hotel menurut Undang Undang No 28 Tahun 2009 DKI Jakarta adalah dengan rumus sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak

= 10 % X Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada hotel

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), dalam praktek pemungutan pajak hotel menggunakan dua sistem yaitu :

1. Sistem langsung.

Sistem langsung yaitu wajib pajak langsung membayar pajak ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) dinas pendapatan daerah dan kemudian Bendahara Khusus Pemerintah menyerahkan ke Bank Pembangunan (BPD) Daerah sebagai pemegang kas daerah.

2. Sistem Tidak Langsung.

Yaitu tugas pungut dinas pendapatan daerah memungut pajak ke tempat wajib pajak berada kemudian menyertakan ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) pendapatan daerah dan diteruskan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Potensi merupakan daya, kemampun atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima pada keadaan seratus persen (Kesit Bambang Prakosa, 2003). Potensi pajak lebih besar daripada target yang ingin dicapai, apabila penerimaan pajak dapat mendekati target, maka pajak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pajak yang efektif dn efisien, nberrti pajak tersebut sudah termasuk pajak dalam

kategori pajak yang mempunyai potensi. Berarti target pajak tersebut masih dapat ditingkatkan. Dalam peningkatan suatu target untuk mendekati potensi yang ada, maka perlu juga diadakan pembenahan baik sarana maupun prasarana obyek pajak tersebut, dalam hal ini adalah hotel atau dengan adanya pembangunan sarana yang baru sehingga obyek pajak semakin meningkat dan potensi juga semakin meningkat.

Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan adalah suatu kejadian atau keadaan yang menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang sedang dijalankan. Dalam hubungannya dengan perpajakan maka hambatan yang terjadi adalah pada masalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak, tenaga pemungut, peraturan-peraturan dan faktor-faktor lain yang ada.

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hotel

1. Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan waktu

luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan.

Adapun ilmu sosiologi menilai pariwisata sebagai rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di suatu tempat dengan penduduk lokal. Krapf Hunziker, seorang pakar pariwisata meyakini bahwa wisata adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh seorang yang bukan penduduk asli.

Berdasarkan seluruh definisinya, pariwisata adalah fenomena yang terus berkembang. Lebih dari itu, industri ini telah menyelamatkan sejumlah negara dari krisis, dan memarakkan pertumbuhan ekonominya. Menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi dan Herniwati Retno Handayani (2013), Satria Adi Nugraha dan Dul Muid (2012) jumlah wisatawan dihitung dalam satuan orang.

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan (Karyono, 1997:21) :

1. Wisatawan lokal (*local tourist*), yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.

2. Wisatawan mancanegara (*international tourist*), yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang bersal dari luar negeri.
3. *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.
4. *Business tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.
5. *Common interest tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.
6. *Individual tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.
7. *Group tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

2. Jenis Hotel

Hotel dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut :

- 1) Jasa penginapan
- 2) Pelayanan makanan dan minuman
- 3) Pelayanan barang bawaan
- 4) Pencucian pakaian
- 5) Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a) City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). *City Hotel* disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b) Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c) Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan (*mountain hotel*) atau di tepi pantai (*beach hotel*), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

d) Motel (Motor Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

3. Jumlah Hotel

Menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi dan Herniwati Retno Handayani (2013), Satria Adi Nugraha dan Dul Muid (2012) jumlah hotel dihitung dalam satuan unit. Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan, menurut Tarmoezi (Tarmoezi, 2000), dari hotel dapat dibedakan menjadi:

a. Small Hotel

kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.

b. Medium Hotel

Jumlah kamar yang disediakan antara 28-299 kamar.

c. Large Hotel

Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

4. Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sedangkan menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi dan Herniwati Retno Handayani (2013), tingkat hunian hotel dihitung dalam satuan hari. Dalam industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan

yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa Penelitian terdahulu tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Hasil Penelitian yang Relevan

NO	JUDUL	VARIABEL	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Satria Adi Nugraha (2012), "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2001-2010"	Variabel Dependen: Pajak Hotel Variabel Independen : Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel Tingkat Hunian Hotel Laju Inflasi	Analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hpte, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.
2	Herlan Suherlan (2016) , "Kontribusi Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil uji Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, dan Pendapatan Per Kapita

	Hunian Kamar, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat”	Jawa Barat Variabel Independen: Kontribusi Jumlah Obyek Wisata Jumlah Wisatawan Tingkat Hunian Kamar Pendapatan Per Kapita		Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat, menunjukkan beberapa hasil, diantaranya bahwa Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata. Sementara itu, Jumlah Wisatawan (JKW) terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sector pariwisata. Sedangkan Jumlah Obyek Wisata (JOW) tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sector pariwisata. Sementara itu, Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sector pariwisata.
3	Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)”	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Hotel Variabel Independen: Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel Tingkat Hunian Hotel	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.	Terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel, semakin tinggi pula penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti banyak sedikitnya

				jumlah hotel tidak akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.
4	Kadek Dewi Udayantini, I Wayan Bagia, I Wayan Suwendra (2015), “Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013”	Variabel Dependen: Pendapatan Sektor Pariwisata Variabel Independen: Jumlah Wisatawan Tingkat Hunian	Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal	Hasil Penelitian mengenai pengaruh dari variabel jumlah kunjungan wisatawan terhadap tingkat hunian hotel di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat hunian hotel di Kabupaten Buleleng, Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Karsadi (2002) mengatakan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap tingkat hunian hotel, apabila jumlah kunjungan wisatawan turun akan mengakibatkan tingkat hunian turun atau melorot dan sebaliknya. Apabila jumlah kunjungan wisatawan meningkat, maka akan mengakibatkan tingkat hunian meningkat.
5	Aldo Adam (2013), “Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel”	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Hotel Variabel Independen: Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel	Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Korelasi Berganda.	1. Jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Hal ini disebabkan banyak wisatawan yang datang ke kota Manado, tetapi tidak menginap di hotel melainkan di rumah saudara atau kerabat yang ada di Manado. 2. Jumlah hotel memberikan pengaruh yang signifikan

				<p>terhadap penerimaan pajak hotel, dan perkembangan pajak hotel dari tahun 2005-2011, data menunjukkan ada yang tetap, dan ada yang bertambah.</p> <p>3. Terdapat hubungan yang searah dan kuat antara jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.</p>
6	<p>Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2014) “ Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013”</p>	<p>Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Retribusi Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, (3) ada pengaruh positif secara parsial dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, (4) ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.</p>
7	<p>Randy J.R. Walakandou (2013) “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado”</p>	<p>Variabel independen: Kontribusi Pajak Hotel</p> <p>Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>metode analisis deskriptif</p>	<p>Berdasarkan pembahasan dan hasil pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu pajak Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD kota Manado pada tahun 2007 – 2011 yaitu sebesar 5,60% pada tahun 2007, 5,38% pada tahun 2008, 7,63% pada tahun 2009, 8,11% pada tahun 2010, dan 7,71% pada tahun 2011.</p>

8	Rifqy Sabatini, Evi Yulia Purwanti (2013) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang”	<p>Variabel Dependen: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel</p> <p>Variabel Independen: Tingkat hunian kamar Tarif kamar rata-rata PDRB deflator Jumlah Wisatawan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda</p>	<p>1. Hasil estimasi model Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 1996-2010 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) sebesar 50,4%. Hal ini berarti variasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang mampu dijelaskan oleh variabel tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, PDRB, dan jumlah wisatawan sebesar 50,4%.</p> <p>2. Berdasarkan hasil perhitungan menyatakan bahwa variabel tingkat hunian kamar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel sebesar 3,956. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan tingkat hunian sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 3,95.</p> <p>3. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel tarif kamar rata-rata berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel sebesar 295,705. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan tarif kamar rata-rata sebesar Rp. 1,00 maka akan menaikkan penerimaan pajak hotel sebesar Rp 295,70.</p> <p>4. Dari hasil perhitungan menunjukkan variabel PDRB dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.</p>
9	Anita Candrasari, Sutjipto Ngumar	<p>Variabel Independen:</p>	<p>penelitian ini</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak</p>

	(2016), “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”	Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif	tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.
10	Yesi Dwi Anggraini, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015) “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”	Variabel Independen : Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel Laju Inflasi Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Hotel	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam pemungutan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011 – 2014 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel secara parsial, Sedangkan jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini dikarenakan tingkat pembangunan hotel di Kota Palembang yang cukup meningkat setiap tahunnya yang

			<p>menunjukkan bahwa permintaan akan tempat menginap (Hotel) cukup besar sehingga penerimaan dari pajak hotel juga akan meningkat.</p> <p>2. Jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan laju inflasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Palembang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan jumlah hotel di Kota Palembang dan dengan meningkatnya jumlah hotel dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Palembang. Selain itu, inflasi juga berpengaruh positif terhadap pengelola hotel karena meningkatkan jumlah keuntungan dari transaksi yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Palembang</p>
--	--	--	--

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2017

C. Kerangka Teoritik

Penelitian ini mengkaji pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta).

1. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel

Konsep teori agen adalah hubungan antara agen dan *principal*, dimana jumlah wisatawan (masyarakat) berperan sebagai agen dan Pemerintah daerah sebagai *principal*. Dalam teori keagenan tersebut, masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan hotel membayar pajak hotel kepada pihak hotel. Lalu pihak hotel melaporkannya kepada Pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengumpulkan bukti pembayaran pajak hotel dari pihak hotel untuk dijadikan laporan pajak daerah.

Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Jakarta banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah, keanekaragaman budaya, maupun panorama alamnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Di samping mendapat penghasilan pajak dari tempat-tempat wisata, pemerintah daerah juga akan mendapat penghasilan dari pajak yang dikenakan hotel terhadap tamunya. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jakarta dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta.

Dalam penelitian Satria Adi Nugraha, Dul Muid (2012), mengatakan bahwa Variabel jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2001-2010. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t

hitung sebesar 1,662 lebih kecil dari t tabel 1,943 dan tingkat signifikansi sebesar 0,166, lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak. Sedangkan hasil penelitian dari Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011.

2. Pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel

Konsep teori agen adalah hubungan antara agen dan *principal*, dimana jumlah hotel (pengusaha hotel) berperan sebagai agen dan Pemerintah daerah sebagai *principal*. Dalam teori keagenan tersebut, para pengusaha hotel menyetorkan pajak hotel yang telah dipungut dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Pemerintah daerah mengumpulkan bukti pembayaran pajak hotel dari pihak hotel untuk dijadikan laporan pajak daerah.

Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Jakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Menurut Yesi Dwi Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015) jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang dikarenakan tingkat pembangunan hotel di Kota Palembang yang cukup meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa permintaan akan tempat menginap (Hotel) cukup besar sehingga penerimaan dari pajak hotel juga akan meningkat. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) menemukan bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011.

3. Pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel

Konsep teori agen adalah hubungan antara agen dan *principal*, dimana tingkat hunian hotel (pengusaha hotel) berperan sebagai agen dan Pemerintah daerah sebagai *principal*. Dalam teori keagenan tersebut, para pengusaha hotel menyetorkan pajak hotel yang telah dipungut dari jumlah ruangan yang dihuni oleh masyarakat. Pemerintah daerah mengumpulkan bukti pembayaran pajak hotel dari pihak hotel untuk dijadikan laporan pajak daerah.

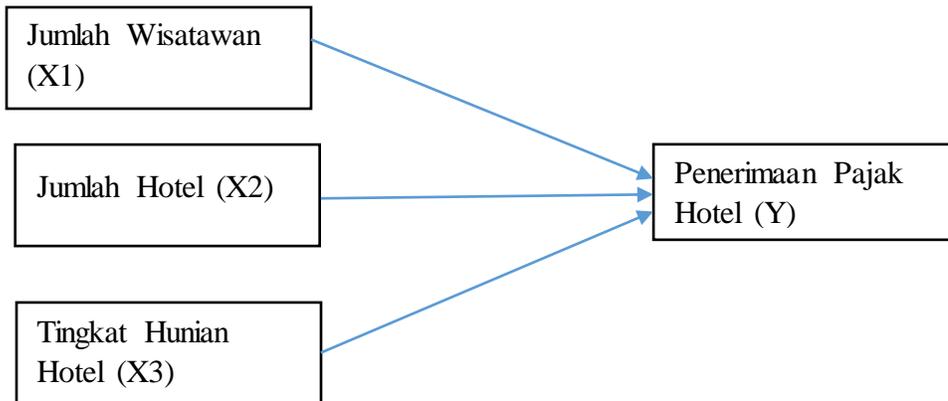
Dewasa ini pembangunan hotel-hotel, terutama di kota besar, berkembang dengan pesat. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja. Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan

tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industry pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001) sehingga pada akhirnya penerimaan daerah akan meningkat melalui pengenaan Pajak Hotel.

Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris (2011) menemukan bahwa bahwa variabel tingkat hunian kamar mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Perhotelan. Sedangkan hasil penelitian dari Sedangkan menurut hasil penelitian dari Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) menemukan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011.

Berdasarkan kajian teoritik dan beberapa penelitian terdahulu, maka kerangka Pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Teoritik



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2017

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, dan kajian teori yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel.

H2 : Jumlah Hotel berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel.

H3 : Tingkat Hunian Hotel berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian yaitu:

1. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta periode 2012-2014.
2. Menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta periode 2012-2014.
3. Menganalisis pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta periode 2012-2014.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Provinsi DKI Jakarta.

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif (dianalisis dengan menggunakan *program EViews 9 for window*), karena menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian,

sehingga mendapat suatu kesimpulan. Penelitian ini menganalisis 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel independen, dan 1 variabel dependen.

D. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Sampel penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel perbulan selama 36 bulan dari tahun 2012-2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi.

Data yang digunakan adalah data time series adalah data runtut waktu (*time series*) yang merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara beruntutan dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variable yang digunakan ada dua jenis variabel yaitu variabel dependen (Y) dan variable independen (X) sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

a) Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini penerimaan pajak hotel dijadikan sebagai variabel dependen. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel. Menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi dan Herniwati Retno Handayani (2013), penerimaan pajak hotel dihitung dalam satuan rupiah, maka data penerimaan pajak hotel di Kota Jakarta tahun 2012-2014 diukur dalam satuan hitung rupiah.

b) Definisi Operasional

Penerimaan pajak hotel yang digunakan adalah data yang bersumber dari kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa penerimaan pajak hotel baik hotel berbintang maupun melati di DKI Jakarta tahun 2012-2014.

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini melibatkan empat variabel independen sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan

a) Definisi Konseptual

Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Jakarta tahun 2012-2014. Menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi dan Herniwati Retno Handayani (2013), jumlah wisatawan dihitung dalam satuan orang, maka data jumlah wisatawan di Kota Jakarta tahun 2012-2014 diukur dalam satuan orang.

b) Definisi Operasional

Jumlah wisatawan yang digunakan adalah data yang bersumber dari kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta tahun 2012-2014.

2. Jumlah hotel

a) Definisi Konseptual

Menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi dan Herniwati Retno Handayani (2013), jumlah hotel dihitung dalam satuan unit. Maka data

jumlah hotel di Kota Jakarta tahun 2012-2014 diukur dalam satuan unit baik hotel berbintang maupun hotel melati.

b) Definisi Operasional

Jumlah hotel yang digunakan adalah data yang bersumber dari Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta berupa banyaknya jumlah hotel berbintang maupun melati yang ada di DKI Jakarta tahun 2012-2014.

3. Tingkat hunian hotel

a) Definisi Konseptual

Tingkat hunian hotel adalah banyaknya jumlah kamar hotel berbintang dan melati di Kota Jakarta yang terjual atau terhuni. Menurut Darmadjati (2006) mengatakan bahwa tingkat hunian hotel adalah persentase dari kamar-kamar yang terisi atau disewakan kepada tamu yang dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang disewakan yang diperhitungkan dalam jangka waktu, misalnya harian, bulanan atau tahunan. Maka data tingkat hunian hotel di Kota Jakarta tahun 2012-2014 diukur dalam satuan persentase.

b) Definisi Operasional

Tingkat hunian hotel yang digunakan adalah data yang bersumber dari kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa persentase dari kamar yang terisi baik dari hotel berbintang maupun melati.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Data Kuantitatif dengan Analisis Statistik Deskriptif yaitu statistik yang digunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku dalam umum atau generalisasi.

1. Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama / simultan terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011: 98 dalam Linda, 2014). Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq b_k \neq 0$$

Artinya, secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 98). Uji ini juga menguji secara signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu model parameter (b_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji R^2

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:98). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:98).

4. Uji Regresi Berganda

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2011:210), regresi linear berganda/majemuk digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Hotel

X1 = Jumlah wisatawan

X2 = Jumlah hotel

X3 = Tingkat hunian hotel

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Kesalahan gangguan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini membahas mengenai hubungan variabel independen yaitu Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel dengan variabel dependennya ialah Penerimaan Pajak Hotel. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2014

Peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 36 yang diperoleh dari 12 Bulan selama tahun 2014-2016. Rincian pengambilan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.1 Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Bulan yang diambil	12
Jumlah Tahun yang diambil	3
Jumlah Observasi secara keseluruhan (3 Tahun X 12 Bulan)	36

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data serta sebaran data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Variabel bebas (Independen) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari), Jumlah Wisatawan (JW), Jumlah Hotel (JH), Tingkat Hunian Hotel (THH) sedangkan variabel terikatnya Penerimaan Pajak Hotel (PPH). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi Eviews 9. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dijabarkan pada Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2 Hasil Statistik Deskriptif

	JH	JW	THH	PPH
Mean	2.673260	5.271888	1.756051	10.98514
Median	2.683491	5.277939	1.758552	10.97415
Maximum	2.720986	5.351201	1.785906	11.17638
Minumum	2.613842	5.162089	1.704078	10.74777
Std.Dev.	0.042252	0.038865	0.020845	0.090208

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Eviews 9 pada Tabel IV.2, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Penerimaan Pajak Hotel (PPH)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai PAD (Y) dari 36 sampel mempunyai nilai minimum sebesar 10.74777 terjadi pada bulan September 2012

dengan nilai rupiah sebesar 55.946.755.447, nilai maksimum sebesar 11.17638 yang terjadi dibulan Desember 2014 dengan nilai rupiah sebesar 150.098.526.235, nilai rata rata (*Mean*) sebesar 10.98514, nilai tengah (*Median*) sebesar 10.97415 dan Standar deviasi sebesar 0.090208. Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hotel (PPH) memiliki sebaran data yang baik.

b. Jumlah Wisatawan (JW)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai JW (X1) dari 36 sampel mempunyai nilai minimum sebesar 5.162089 terjadi pada bulan Agustus 2012 dengan jumlah sebesar 145.241, nilai maksimum sebesar 5.351201 yang terjadi dibulan Agustus 2014 dengan jumlah sebesar 224.492, nilai rata rata (*Mean*) sebesar 5.271888, nilai tengah (*Median*) sebesar 5.277939 dan Standar deviasi sebesar 0.038865. Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Wisatawan (JW) memiliki sebaran data yang baik.

c. Jumlah Hotel (JH)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai JH (X2) dari 36 sampel mempunyai nilai minimum sebesar 2.613842 terjadi dibulan Januari 2012 dengan jumlah sebesar 411, nilai maksimum sebesar 2.720986 terjadi dibulan Februari 2014 dengan jumlah sebesar 526, nilai rata rata (*Mean*) sebesar 2.673260, nilai tengah (*Median*) sebesar 2.683491 dan Standar deviasi sebesar 0.042252. Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Hotel (JH) memiliki sebaran data yang baik.

d. Tingkat Hunian Hotel (THH)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai THH (X3) dari 36 sampel mempunyai nilai minimum sebesar 1.704708 terjadi dibulan Maret 2014 dengan jumlah sebesar 50,67%, nilai maksimum sebesar 1.785906 terjadi dibulan Desember 2013 dengan jumlah sebesar 61,08%, nilai rata rata (Mean) sebesar 1.756051, nilai tengah (*Median*) sebesar 1.758552 dan Standar deviasi sebesar 0.020845. Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Hunian Hotel (THH) memiliki sebaran data yang baik.

B. Pengujian Hipotesis

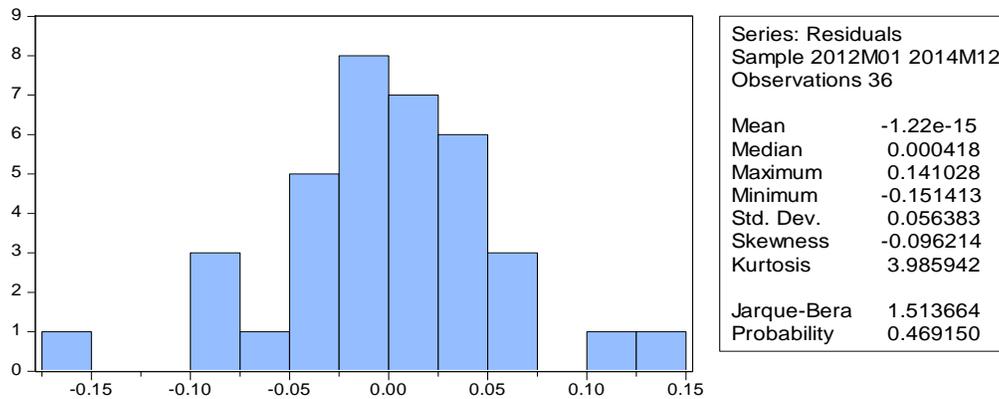
1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi Normal atau Tidak. Uji Normalitas yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Jerque-Bera (JB). Menurut (Winarno,2009) Uji Normalitas yang dilakukan dengan Jerque-Bera (JB) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Nilai Jerque-Bera (JB) lebih kecil dari 2, maka data berdistribusi Normal.
- 2) Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau 0,05 maka data terdistribusi Normal.

Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan Gambar IV.I Hasil Uji Normalitas, diketahui bahwa hasil *Jarque-Bera* hitung sebesar 1.513664 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Dari keterangan diatas kita mengetahui bahwa hasil dari Uji Normalitas terdistribusi dengan Normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel dependen. Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Independen). Untuk mendeteksi ada dan tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat diukur dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Centered VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2011)

Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 02/02/18 Time: 18:16
 Sample: 2012M01 2014M12
 Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.731151	28277.09	NA
JW	0.092210	26535.32	1.402016
JH	0.086013	6365.606	1.545690
THH	0.257066	8208.584	1.124389

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinearitas, diketahui bahwa hasil Centered VIF JW sebesar 1.402016, JH sebesar 1.545690, dan THH sebesar 1.124389. sesuai dengan syarat Uji Multikolinearitas, maka ketiga variabel tersebut bebas atau tidak terdapat Multokolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada didalam model regresi. Metode Regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali,2011). Dalam Penelitian ini, penguji dalam melakukan Uji Autokorelasi menggunakan Uji Breusch-GodfreySerial Correlation LM Test.

Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.463671	Prob. F(2,30)	0.6334
Obs*R-squared	1.079443	Prob. Chi-Square(2)	0.5829

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi, dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test diketahui nilai probabilitas F(2,30) sebesar 0.6334. Nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat $\alpha = 0.05$ atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey.

Tabel IV.5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.805381	Prob. F(3,32)	0.5002
Obs*R-squared	2.527337	Prob. Chi-Square(3)	0.4704
Scaled explained SS	2.981326	Prob. Chi-Square(3)	0.3945

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.5 Hasil Uji Heterokedastisitas, diketahui Nilai Probabilitas dari Chi-Square (3) sebesar 0.4704 lebih besar dari tingkat alpha sebesar 0.05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi atau bebas heterokedastisitas.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Rumus dari analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PPH = a + b_1 JW + b_2 JH + b_3 THH + e$$

$$PPH = 4.70736387138 - 0.274355210728 * JW + 1.86663633537 * JH + 1.55698255949 * THH$$

Keterangan:

PPH : Penerimaan Pajak Hotel

a : Konstanta

JW : Jumlah Wisatawan

JH : Jumlah Hotel

THH : Tingkat Hunian Hotel

e : Error

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar 4.70736387138 menjelaskan bahwa variabel Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel sama dengan 0 (nol)

- atau tetap. Maka Penerimaan Pajak Hotel akan berkurang sebesar 4.70736387138.
2. Jumlah Wisatawan mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar - 0.274355210728, hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah wisatawan turun 1 satuan maka Penerimaan Pajak Hotel akan naik sebesar 0.274355210728 dengan asumsi bahwa faktor faktor variabel lain tetap atau *ceteris paribus*.
 3. Jumlah Hotel mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1.86663633537, hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah hotel naik 1 satuan maka penerimaan pajak hotel akan naik sebesar 1.86663633537, dengan asumsi bahwa faktor faktor variabel lain tetap atau *ceteris paribus*.
 4. Tingkat Hunian Hotel mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1.55698255949, hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat hunian hotel turun 1 satuan maka penerimaan pajak hotel akan naik sebesar 1.55698255949, dengan asumsi bahwa faktor faktor variabel lain tetap atau *ceteris paribus*.

3. Uji Hipotesis

Untuk melakukan Uji Hipotesis, peneliti menggunakan Uji Statistik T dan Uji Statistik F dalam menguji hipotesis.

a. Uji Statistik t (Parsial)

Uji Statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji Statistik t memberikan gambaran sejauh mana pengaruh satu variabel

independen terhadap variabel dependen. Pengukuran yang digunakan untuk Uji Statistik t adalah perbandingan antara ttabel dan thitung.

Tabel IV.6 Hasil Uji Statistik t

Dependent Variable: PPH
 Method: Least Squares
 Date: 02/02/18 Time: 17:49
 Sample: 2012M01 2014M12
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.707364	1.652619	2.848426	0.0076
JW	-0.274355	0.303662	-0.903490	0.3730
JH	1.866636	0.293279	6.364705	0.0000
THH	1.556983	0.507017	3.070868	0.0043

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Hasil Pengujian Hipotesis

a) Jumlah Wisatawan (JW) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (PPH)

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, bahwa variabel jumlah wisatawan memiliki nilai thitung sebesar -0.903490 dibawah ttabel sebesar 2.03693 dan nilai probabilitas sebesar 0.3730 yang berada diatas $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

b) Jumlah Hotel (JH) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (PPH)

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, bahwa variabel jumlah hotel memiliki nilai thitung sebesar 6.364705 diatas ttabel 2.03693 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berada dibawah $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa jumlah hotel memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

c) Tingkat Hunian Hotel (THH) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (PPH)

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, bahwa tingkat hunian hotel memiliki nilai thitung sebesar 3.070868 diatas ttabel sebesar 2.03693 dan nilai probabilitas sebesar 0.0043 yang berada dibawah $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian hotel memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

b. Uji Statistik F (Simultan)

Uji Statistik F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi yang ada. Syarat ada atau tidaknya pengaruh signifikan dalam Uji F yaitu dengan membanding kan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas (independen) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen), sebaliknya jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel bebas (independen) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). F tabel dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$(k; n-k)$$

Keterangan:

K : Jumlah variabel bebas (independen)

N : Jumlah responden atau sampel dalam penelitian

Hasil pengujian statistik F yang dilakukan oleh penelitian sebagai berikut:

Tabel IV.7 Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.609330	Mean dependent var	10.98514
Adjusted R-squared	0.572705	S.D. dependent var	0.090208
S.E. of regression	0.058967	Akaike info criterion	-2.719249
Sum squared resid	0.111266	Schwarz criterion	-2.543302
Log likelihood	52.94648	Hannan-Quinn criter.	-2.657839
F-statistic	16.63687	Durbin-Watson stat	1.688862
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.7 Hasil Uji Statistik F, diketahui bahwa Fhitung sebesar 16.63687 lebih besar dari pada Ftabel (3;33) sebesar 2.89. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara menyeluruh mempengaruhi variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Koefisien Determinasi untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1.

Tabel IV.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.609330	Mean dependent var	10.98514
Adjusted R-squared	0.572705	S.D. dependent var	0.090208
S.E. of regression	0.058967	Akaike info criterion	-2.719249
Sum squared resid	0.111266	Schwarz criterion	-2.543302
Log likelihood	52.94648	Hannan-Quinn criter.	-2.657839
F-statistic	16.63687	Durbin-Watson stat	1.688862
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi, diketahui bahwa Adjusted R-Square sebesar 0.572705 yang berarti variabel bebas pada penelitian ini yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel dapat menjelaskan variabel terikat yaitu Penerimaan pajak hotel sebesar 0.572705 atau 57% sementara 43% lainnya dijelaskan oleh variabel variabel bebas lainnya diluar penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Menurut Kompas.com kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2013 menurun 10,23 persen dibandingkan dengan Juni 2013. Ini diduga sebagai imbas dari kelesuan ekonomi global dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Jika dibandingkan dengan periode Juli 2012, angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta turun 0,82 persen.

Menurut Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS DKI Jakarta Dody Rudyanto, "Sebagian besar wisatawan mancanegara itu berasal dari Asia, seperti China, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Ketika mata uang rupiah melemah terhadap dollar AS, biasanya masih banyak wisatawan yang datang. Namun, karena negara mereka juga mengalami depresiasi mata uang, kunjungan wisata juga menurun".

Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta Krishnadi berpendapat senada. Menurut dia, kelesuan

ekonomi global dan turunnya nilai tukar sejumlah mata uang negara asing terhadap dollar AS berimbas pada tingkat hunian hotel. ”Yang paling terasa adalah hotel bintang lima. Kalau hotel bintang dua atau tiga kemungkinan bertahan”.

Penurunan tingkat hunian hotel bintang lima ini disebabkan sebagian pengguna kamar bintang lima akan beralih ke kelas di bawahnya demi penghematan. Ada juga kunjungan bisnis dari tamu asing yang tidak jadi dilakukan oleh pucuk pimpinan, tetapi diganti level manajer sehingga penginapan juga digunakan di hotel bintang dua atau tiga. Kelesuan tingkat hunian kamar ini, menurut Krishnadi, juga terjadi karena pada Juli juga merupakan bulan puasa bagi umat Muslim. Hal ini ikut memengaruhi kunjungan ke DKI

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menghasilkan hasil yang sama menurut Aldo Adam (2013) yang berpendapat bahwa jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado tahun 2005-2011.

2. Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Konsep teori agen adalah hubungan antara agen dan *principal*, dimana jumlah hotel (pengusaha hotel) berperan sebagai agen dan Pemerintah daerah sebagai *principal*. Dalam teori keagenan tersebut, para pengusaha hotel menyetorkan pajak hotel yang telah dipungut dari masyarakat atas pelayanan

yang diberikan oleh pihak hotel. Pemerintah daerah mengumpulkan bukti pembayaran pajak hotel dari pihak hotel untuk dijadikan laporan pajak daerah.

Menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani melalui Detik.com "Hotel itu kan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi besar, orang bepergian anggarannya juga besar, nah itu biasanya nambah. Kalau kayak gini agak repot ya, karena ekonominya kan agak *stuck*, daya beli masyarakat juga (melambat)". Pertumbuhan hotel baru sendiri, menurutnya, mulai melambat sejak tahun 2016. Di tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan industri perhotelan bahkan mencapai 10% per tahun. "Naiknya yang paling banyak di sekitar 2012-2015. Itu naiknya bisa rata-rata 10%. Tapi setelah 2016 mulai stagnan. Pembangunan hotel relatif enggak begitu banyak lagi".

Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menghasilkan hasil yang sama menurut Yesi Dwi Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015)

yaitu nilai t hitung (7,470) > t tabel (1,680), maka H_0 diterima yang berarti bahwa jumlah hotel memberikan pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Dan Menurut Aldo Adam (2013) jumlah hotel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, dan perkembangan pajak hotel dari tahun 2005-2011, data menunjukkan ada yang tetap, dan ada yang bertambah.

3. Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Konsep teori agen adalah hubungan antara agen dan *principal*, dimana tingkat hunian hotel (pengusaha hotel) berperan sebagai agen dan Pemerintah daerah sebagai *principal*. Dalam teori keagenan tersebut, para pengusaha hotel menyetorkan pajak hotel yang telah dipungut dari jumlah ruangan yang dihuni oleh masyarakat. Pemerintah daerah mengumpulkan bukti pembayaran pajak hotel dari pihak hotel untuk dijadikan laporan pajak daerah.

Belakangan ini pembangunan hotel-hotel, terutama di kota besar, berkembang dengan pesat. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama dibidang perhotelan harus ditingkatkan agar memperoleh penghasilan yang meningkat.

Menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani melalui Detik.com tingkat okupansi hotel saat ini 50-55%, dan ini tergolong rendah. Penyebabnya, selain karena tren masyarakat yang cenderung berhemat, kelebihan suplai kamar juga ikut berimbas pada rendahnya tingkat hunian hotel. "Okupansi itu sekarang kalau nasional kita perkiraan antara sekitar 50-55% lah skala nasional. Itu kurang. Yang bagus di atas 60% lah. Tadi kan karena suplainya nambah, kamarnya nambah, tapi pasarnya berkurang".

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menghasilkan hasil yang sama menurut Satria Adi Nugraha dan Dul Muid (2012) yaitu t hitung sebesar 1,296 lebih kecil dari pada t tabel sebesar 1.943 artinya t hitung lebih kecil dari t tabel maka variabel tidak berpengaruh. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0.251, lebih besar dari 0.05, yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak. Dan menurut Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) hasil penelitian menemukan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011.

4. Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel secara simultan berpengaruh. Hal ini berdasarkan hasil uji koefisien determinasi. Pada uji tersebut, hasil adjusted

R-squared menjadi tolak ukur pengaruh variabel independen secara simultan. Menunjukkan hasil 0,572705 yang berarti berpengaruh sebesar 57% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Dari hasil pengaruh tersebut peneliti mengetahui bahwa untuk meningkatkan jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel diperlukan peningkatan fasilitas dari hotel tersebut. Sehingga membuat wisatawan lebih banyak memilih untuk bermalam dihotel dibandingkan bermalam dirumah kerabat atau saudara dan meningkatkan penerimaan pajak hotel.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilaksanakan penelitian tentang pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta 2012-2014, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengaruh antara jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel. Hal itu mengindikasikan banyaknya jumlah hotel tidak mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Seperti yang diketahui bahwa kontribusi jumlah wisatawan tidak sebesar kontribusi jumlah hotel. Sehingga kontribusinya untuk penerimaan pajak hotel kurang maksimal.
2. Terdapat pengaruh positif yang ditunjukkan oleh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini mengindikasikan banyak jumlah hotel maka semakin tinggi juga penerimaan pajak hotel. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah hotel memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini harus diikuti oleh faktor-faktor lainnya sehingga membuat penerimaan pajak hotel semakin meningkat ditahun berikutnya.
3. Tidak adanya pengaruh antara tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Hal itu mengindikasikan besarnya tingkat hunian hotel tidak mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Seperti yang diketahui bahwa

kontribusi besarnya tingkat hunian hotel tidak sebesar kontribusi jumlah hotel. Sehingga kontribusinya untuk penerimaan pajak hotel kurang maksimal.

B. Implikasi

Dalam penelitian tentang pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012-2014 dirumuskan dalam beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Maka dari itu pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai sumber penerimaan tersebut, sehingga ke depannya pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi dari semua sektor penerimaan pajak daerah yang ada.
2. Jumlah hotel memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Sehingga Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan sumber penerimaan pajak hotel sambil mengevaluasi yang ada agar sumber penerimaan tersebut tidak hanya sementara saja. Pemerintah daerah harus lebih menyadari pentingnya penerimaan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Dari hasil penelitian tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerahnya sehingga menjadi daerah yang sesuai dengan visi dan misi diadakannya otonomi daerah.

C. Saran

Setelah penelitian dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian yang akan datang :

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperbanyak sampel penelitian seperti ditambahkan jumlah tahunnya, hal ini dipergunakan untuk meningkatkan hasil dari penelitian yang relevan. Selain menambahkan jumlah sampelnya juga bisa ditambahkan variabel bebas (independen) untuk meningkatkan jumlah penjelasan dalam variabel terikat (dependen). Variabel bebas lain yang bisa menjadi faktor penerimaan pajak hotel seperti laju inflasi, variabel terikat selain penerimaan pajak hotel bisa digantikan dengan Pendapatan sektor pariwisata.
2. Adanya keterbatasan yang dialami oleh peneliti, yaitu pada saat mengumpulkan data. Banyak data tentang jumlah hotel yang belum tercatat dengan baik untuk tahun sebelum 2012. Sehingga peneliti hanya meneliti mulai dari tahun 2012 ke atas.
3. Diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat suatu regulasi yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan hotel yang sangat pesat di DKI Jakarta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antar hotel. Dengan demikian hotel-hotel yang sudah ada dapat tetap eksis untuk memberikan kontribusi penerimaan Pajak Hotel melalui jumlah unit kamar yang terjual.

4. Dari pihak hotel sendiri diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dimiliki untuk lebih dapat meningkatkan tingkat hunian kamar yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hari Karyono, **Kepariwisataaan**. Jakarta: Grasindo, 1997
- Adam, Aldo. “Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel”, **ISSN 2303-1174**
- Adiningrat, Andi Arifwangsa dan Subhan. Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar. **Jurnal Perspektif p-ISSN: 2355-0538 Vol.02, Nomor 01 Januari-Juni 2017**
- Aliandi, Vidya Dwi Anggitasari, Herniwati R. “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)”, **Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013**
- Candrasari, Anita dan Ngumar, Sutjipto. “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016**
- Ghozali, Imam. **Statistik Non-Parametrik Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS**. Semarang: Undip, 2002
- Manurung, Heldin dan Trizno Tarmoezi. **Manajemen Front Office Hotel**. Bekasi: Kesaint Blanc, 2000
- Nugraha, Satria Adi. “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2001-2010”, **Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012**
- Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel
- Prayanti, Ni Luh Putu Ari dan Suwendra, I Wayan. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. **e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)**
- Sabatini, Rifqy dan Purwanti, Evi Yulia. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang”, **Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013**

Suherlan, Herlan. "Kontribusi Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat". **IJT, Vol. 1, Nomor 1, Desember 2016**

Udayantini, Kadek Dewi dan Bagia, I Wayan. "Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013". **e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Volume 3 Tahun 2015**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Walakandou, Randy J.R. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado", **ISSN 2303-1174**

Anggraini, Yesi D. Sirajuddin, Betri, dan Fajriana, Icha. "Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)", STIE MDP, Palembang. 2015.

Budiarto, Muhammad Taufiq. **Mengintip Bisnis Kamar Kost dari Aspek Perpajakannya.** 2015
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21130-mengintip-bisnis-kamar-kost-dari-aspek-perpajakannya>

Ical. **Kota Bekasi, Surga Kecil Penunggak Pajak.** 2016
<http://klikbekasi.co/2016/10/06/kota-bekasi-surga-kecil-penunggak-pajak/>

Investor Daily Indonesia. **Diperlukan Kepastian Waktu Menuju Lokasi Wisata Jakarta.** 2015
<http://id.beritasatu.com/cosmopolitan/diperlukan-kepastian-waktu-menuju-lokasi-wisata-jakarta/119897>

Kontranews. **Lagi 3 Jenis Pajak ini Diselewengkan Pegawai Pajak.** 2015
<http://kontranews.com/index.php/2015/12/16/lagi-3-jenis-pajak-ini-diselewengkan-pegawai-pajak/>

Lusianawati, Devi. **Mayoritas Rumah Kos Tidak Membayar Pajak.** 2015

<http://www.beritajakarta.com/read/10107/-Mayoritas-Rumah-Kos-Tidak-Membayar-Pajak>

Rosadi, Dian. **Pemilik Kos-Kosan Minim Kesadaran Bayar Pajak.** 2016
<https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pemilik-kos-kosan-minim-kesadaran-bayar-pajak-160428d.html>

Sukarno, Puput Ady. **Penerimaan Pajak, DKI Kemungkinan Hanya Capai 96%.**2016
<http://finansial.bisnis.com/read/20161226/10/615097/penerimaan-pajak-dki-kemungkinan-hanya-capai-96>

Solehin, Raden Mohd. **Tidak Ada Permasalahan Jumlah Hotel yang Tidak Seimbang di Dispenda.** 2015
<http://m.rmolsumsel.com/news.php?id=30616>

Lasti Kurnia. **Ekonomi Global Lesu, Pariwisata DKI Kena Imbas.** 2013.
<http://travel.kompas.com/read/2013/09/03/1055586/Ekonomi.Global.Lesu.Pariwisata.DKI.Kena.Imbas>

Muhammad Idris. **Tingkat Hunian Kamar Rendah, Pengusaha Hotel Tunda Ekspansi.** 2017.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3528452/tingkat-hunian-kamar-rendah-pengusaha-hotel-tunda-ekspansi>

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Daftar Sampel

Penerimaan Pajak Hotel

	2012	2013	2014
Januari	86.324.166.873	83.723.424.029	119.596.127.285
Februari	71.187.211.375	76.929.655.435	100.007.718.373
Maret	76.401.906.644	85.298.950.299	107.284.222.617
April	80.671.279.056	89.665.643.001	114.555.452.267
Mei	78.674.886.626	93.368.171.535	101.448.286.227
Juni	84.320.799.750	102.868.740.863	113.956.996.857
Juli	85.316.235.320	94.250.101.571	111.085.976.763
Agustus	83.703.618.980	77.710.451.736	89.948.187.238
September	55.946.755.447	88.493.777.877	109.072.488.415
Oktober	94.304.267.370	120.045.735.564	138.601.486.774
November	94.191.611.098	120.028.667.532	126.596.930.457
Desember	122.179.471.909	124.242.992.070	150.098.526.235

Jumlah Wisatawan

	2012	2013	2014
Januari	162.368	167.392	193.017
Februari	159.598	187.429	185.851
Maret	172.126	192.108	204.004
April	167.553	168.986	186.373
Mei	191.494	185.485	190.716
Juni	175.391	217.309	213.950
Juli	196.695	195.073	173.914
Agustus	145.241	194.204	224.492
September	188.578	207.723	179.723
Oktober	190.762	198.066	184.012
November	191.703	205.468	186.945
Desember	184.004	194.549	196.298

Jumlah Hotel

	2012	2013	2014
Januari	411	438	524
Februari	413	449	526
Maret	416	455	525
April	416	462	525
Mei	420	471	524
Juni	420	480	523
Juli	418	485	522
Agustus	419	489	520
September	420	492	521
Oktober	421	502	519
November	422	511	518
Desember	426	524	516

Tingkat Hunian Hotel

	2012	2013	2014
Januari	58,88	53,50	56,94
Februari	60,00	56,04	50,87
Maret	56,71	55,27	50,67
April	57,35	57,77	52,85
Mei	59,17	53,39	55,52
Juni	59,75	55,02	58,07
Juli	60,01	54,77	56,59
Agustus	55,88	54,80	57,03
September	57,74	55,73	58,66
Oktober	59,58	58,45	58,59
November	59,81	61,04	59,71
Desember	60,57	61,08	57,36

Lampiran 2. Transformasi Log

BULAN	Penerimaan Pajak Hotel	Jumlah Wisatawan	Jumlah Hotel	Tingkat Hunian Hotel
Jan-12	10,94	5,21	2,61	1,77
Feb-12	10,85	5,20	2,62	1,78
Mar-12	10,88	5,24	2,62	1,75
Apr-12	10,91	5,22	2,62	1,76
Mei-12	10,90	5,28	2,62	1,77
Jun-12	10,93	5,24	2,62	1,78
Jul-12	10,93	5,29	2,62	1,78
Agu-12	10,92	5,16	2,62	1,75
Sep-12	10,75	5,28	2,62	1,76
Okt-12	10,97	5,28	2,62	1,78
Nov-12	10,97	5,28	2,63	1,78
Des-12	11,09	5,26	2,63	1,78
Jan-13	10,92	5,22	2,64	1,73
Feb-13	10,89	5,27	2,65	1,75
Mar-13	10,93	5,28	2,66	1,74
Apr-13	10,95	5,23	2,66	1,76
Mei-13	10,97	5,27	2,67	1,73
Jun-13	11,01	5,34	2,68	1,74
Jul-13	10,97	5,29	2,69	1,74
Agu-13	10,89	5,29	2,69	1,74
Sep-13	10,95	5,32	2,69	1,75
Okt-13	11,08	5,30	2,70	1,77
Nov-13	11,08	5,31	2,71	1,79
Des-13	11,09	5,29	2,72	1,79
Jan-14	11,08	5,29	2,72	1,76
Feb-14	11,00	5,27	2,72	1,71
Mar-14	11,03	5,31	2,72	1,70
Apr-14	11,06	5,27	2,72	1,72
Mei-14	11,01	5,28	2,72	1,74
Jun-14	11,06	5,33	2,72	1,76
Jul-14	11,05	5,24	2,72	1,75
Agu-14	10,95	5,35	2,72	1,76
Sep-14	11,04	5,25	2,72	1,77
Okt-14	11,14	5,26	2,72	1,77
Nov-14	11,10	5,27	2,71	1,78
Des-14	11,18	5,29	2,71	1,76

Lampiran 3. Tabel Uji F

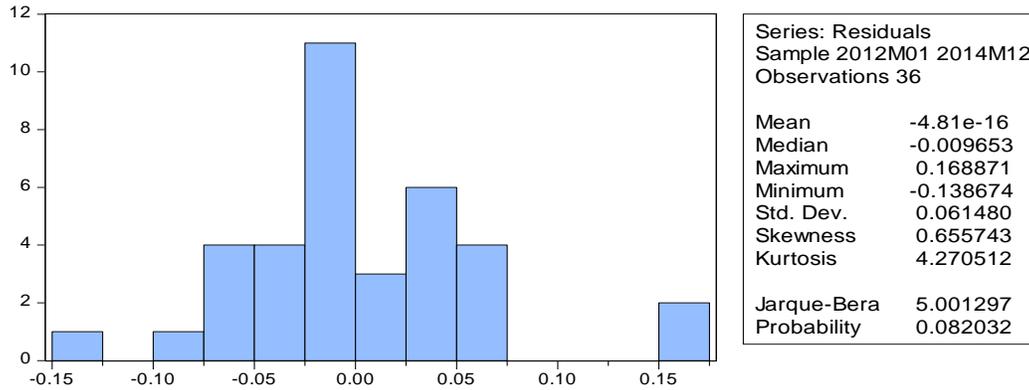
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.13	3.27	2.87	2.64	2.48	2.37	2.28	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.98	1.96

Lampiran 4. Tabel Uji T

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92983
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903

Lampiran 5. Hasil Perhitungan Eviews 9

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 12/05/17 Time: 17:28
 Sample: 2012M01 2014M12
 Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.524844	21986.30	NA
JW	0.124771	30198.53	1.595565
JH	0.095007	5913.738	1.435967
THH	0.395879	10651.99	1.156388

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.483820	Prob. F(2,30)	0.6212
Obs*R-squared	1.124885	Prob. Chi-Square(2)	0.5698

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.205363	Prob. F(3,32)	0.3236
Obs*R-squared	3.655067	Prob. Chi-Square(3)	0.3012
Scaled explained SS	4.722544	Prob. Chi-Square(3)	0.1933

Uji t

Dependent Variable: PPH
Method: Least Squares
Date: 12/02/17 Time: 23:15
Sample: 2012M01 2014M12
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.626519	1.588976	4.170308	0.0002
JW	-0.376162	0.353229	-1.064925	0.2949
JH	1.674419	0.308232	5.432325	0.0000
THH	1.061341	0.629189	1.686839	0.1014

Uji F

R-squared	0.535505	Mean dependent var	10.98514
Adjusted R-squared	0.491958	S.D. dependent var	0.090208
S.E. of regression	0.064297	Akaike info criterion	-2.546160
Sum squared resid	0.132292	Schwarz criterion	-2.370214
Log likelihood	49.83088	Hannan-Quinn criter.	-2.484750
F-statistic	12.29732	Durbin-Watson stat	1.489008
Prob(F-statistic)	0.000016		

Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.535505	Mean dependent var	10.98514
Adjusted R-squared	0.491958	S.D. dependent var	0.090208
S.E. of regression	0.064297	Akaike info criterion	-2.546160
Sum squared resid	0.132292	Schwarz criterion	-2.370214
Log likelihood	49.83088	Hannan-Quinn criter.	-2.484750
F-statistic	12.29732	Durbin-Watson stat	1.489008
Prob(F-statistic)	0.000016		